

Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra)

Moh. Musfiq Arifqi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
musfiqarifqi18@gmail.com

ABSTRACT

The main problem of economic development such as poverty, unemployment, asymmetry of economic among individuals could not be removed successfully in Indonesia. One of the reasons is caused with unreadable other variables such as social law, politics, culture and so on. The size of the success Islamic economic growth is not measured only from the material achievement perspective or the results of quantity, but also from the improving religious perspective, social and society life. The methodology of this research is library research. To get more information, the reference is taken from some book that have relation with the topic. The result is that Ibn Khaldun's thought is referring to the term "umran al-alam" or prospering the world. It is formed from three components, namely; history (tarikh), cooperation among society (al-ijtima 'al-insani) and the universe (al-kawn). Ibnu Khaldun offered the concept of Islamic economic development: First, the contribution of humans (ar-Rijal). Second, the contribution of development (al-Imarah), Third, the contribution of institutions and government. Fourth, the contribution of wealth (al-mal). Umer Chapra believed that the means of quitable development requires "efficiency" and "equalization" of the use of all resources, both "efficiency" and "justice" cannot be applied or actualized without the supporting with moral dimensions in economic activities. Umer Chapra's thoughts are following: First, Efficiency, justice and morality. Second, the contributions of the state. Two thoughts on Islamic economic development below are known that the concept of Islamic economic development does not only measure the level of welfare in the world, but also the more important is how to prosper in the hereafter. The built concept of the two thinkers is directed more to the concept of empowerment or empowering natural resources efficiently and equitably by the role upholding ethical values and social justice.

Keywords: *Islamic development economic, Ibn Khaldun, Umer Chapra, empowerment*

PENDAHULUAN

Peristiwa terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia menyebabkan masyarakat mulai sadar terhadap pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, pada era yang serba teknologi, masyarakat belum sadar bahwa sedang dijajah oleh sistem kontemporer yang bebas etika dan nilai, lebih mementingkan individu, yakni dikenal dengan faham kapitalis. Islam memberikan tawaran sistem alternatif atau jalan tengah yang secara utuh memuat nilai-nilai kehidupan dunia maupun akhirat. Selain itu, keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem etika dan nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi. Hal demikian dapat mengangkat nilai-nilai instrumental dan norma-norma operasionalnya dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Bukan hanya sekedar kerangka pemikiran dari sebuah sistem pemikiran ekonomi Islam, namun dibutuhkan pula rekontuksi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara *sustainable* dan berkelanjutan.

Diskusi tentang kontribusi dan peran aktif ekonomi Islam terhadap pembangunan ekonomi sangat sulit diimplementasikan di Indonesia, karena mengacu pada negara keseluruhan di dunia, sampai saat ini belum ada satu pun negara yang secara utuh menerapkan sistem ekonomi Islam. Mayoritas di beberapa negara hanya lebih memandang pada satu sektor sebagai instrumen pengukuran pembangunannya, yaitu melalui lembaga keuangan Islam. Padahal masih banyak instrumen ekonomi Islam, seperti, industri syariah, wisata syariah, hotel Syariah, halal *food* dan lain-lain. Dengan demikian, apabila berbicara tentang ekonomi Islam, maka seharusnya pola pikir tersebut mengarah pada perilaku ekonomi secara luas yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi.

Sejarah telah mencatat, ilmuwan dan ekonom Islam seperti Al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Taimiyah (1262-1328) dan Ibnu Khaldun (1332-1404), jauh hari telah menulis sebuah konsep unik dalam karyanya masing-masing terkait masalah-masalah ekonomi seperti masalah buruh, masalah nilai, keuangan negara, pajak, hubungan pertumbuhan populasi dengan pertumbuhan ekonomi, hingga hukum permintaan dan penawaran (Aedy, 2011). Bahkan ekonom Muslim kontemporer yang juga banyak berperan seperti Umer Chapra (1933) yang menawarkan konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan* yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara Muslim. Konsep tersebut Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan *worldview* (pandangan) maupun asumsinya mengenai alam, dan hakikat kehidupan manusia di dunia (M Umer Chapra, 1992).

Ibnu Khaldun juga banyak memberikan konsep pemikiran bagi masyarakat Muslim. Dia membincangkan berbagai topik seperti sejarah, geografi, matematik, agama, sistem kerajaan, sistem ekonomi, sistem pendidikan dan lain-lain (Huda, 2013). Bahkan menurut hasil penelitian Mohammad dengan menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun, ia menyimpulkan bahwa Ibnu Khaldun juga memberikan konsep tentang pembangunan ekonomi yang ideal (Mohammad, 2010). Artinya ekonomi pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh umat manusia (*basic needs*), dan “dematerialisasi”. Sebaliknya, fenomena konsumsi berlebihan, korupsi moral dan keserakahan ekonomi adalah indikator awal kejatuhan sebuah peradaban suatu negara. Dengan tawaran ekonomi

pembangunan Ibnu Khaldun demikian tidak menutup kemungkinan jika terealisasi secara maksimal, sistem ekonomi pembangunan Islam di Indonesia akan semakin menunjukkan taring kekuatannya. Bahkan dari itu, perekonomian akan lebih bermanusiawi dan tidak hanya memandang kehidupan di dunia saja, namun hakikat akhirat yang lebih kekal juga menjadi alasan utama

Disamping itu pula, Umer Chapra memperkuat argumennya bahwa Islam mampu menjawab kejadian masyarakat badui yang bermusuhan satu sama salin, kekurangan sumber daya dan iklim yang tidak bersahabat, serta memiliki sedikit kriteria untuk tumbuh, tetapi mereka bisa tumbuh dengan cepat melawan berbagai rintangan dan bertahan dengan kokoh menghadapi superioritas kerajaan Bizantium dan kerajaan Persia (M. Umar Chapra, 1993). Disamping itu pula hasil penelitian dari Bayu Adi Saputra menyimpulkan bahwa konsep pembangunan ekonomi Islam adalah pembangunan yang paling adil dan komprehensif, yang mencakup Tauhid, Khilafah dan Keadilan (Saputra, 2016).

Ibn Khaldun juga berpandangan bahwa manusia tidak akan mampu untuk hidup sendiri, dia akan membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain jika ia hendak memperoleh makanan bagi diri dan sesamanya (Ibnu Khaldun, 2000). Dengan bergotong royong kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Hal ini menjelaskan bahwa dalam bidang ekonomi antara satu komunitas dengan komunitas lain harus saling bekerjasama dan melengkapi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Sedangkan dalam pandangan teori ekonomi pembangunan konvensional, masalah utama ekonomi

pembangunan hanya dapat dilihat dari sudut pandang kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu. Hal demikian di Indonesia masih belum bisa terentaskan secara efektif. Salah satu alasan utamanya karena tidak adanya kerja sama yang intent antara pemangku kebijakan dan masyarakat secara umum. Disamping itu pula, variabel lain belum sepenuhnya diperhatikannya sebagai barometer ekonomi pembangunan, seperti; sosial hukum, politik, budaya dan variabel barometer pembangunan lainnya. Padahal ekonomi pembangunan Islam telah lahir jauh sebelum itu sudah menjadi salah satu alternatif konstruktif pembangunan.

Beberapa contoh tentang instrumen pembangunan ekonomi Islam, semisal sejak instrumen zakat, infak dan sedekah menjadi kewajiban dan anjuran bagi seluruh umat Islam sebagai solusi kemiskinan (tahun ke-2 Hijrah), maka sesungguhnya ekonomi Islam telah memahami problem utama ekonomi pembangunan di kala itu. Ekonomi pembangunan Islam hadir untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin (negara berkembang) yang merdeka pasca perang dunia kedua. Namun faktanya, di Indonesia masih banyak kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Berdasarkan dari beberapa tawaran konsep pembangunan ekonomi Islam di atas, tulisan ini selanjutnya bertujuan untuk melihat konsep dan teori ekonomi pembangunan berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam dari dua tokoh fundamental klasik dan kontemporer yaitu Ibnu Khaldun dan Umer Chapra, karena sejauh ini belum banyak diketahui dikalangan akademisi. Penulis sebelumnya hanya melihat pembangunan ekonomi Islam sebagai bentuk alternatif atau jalan tengah pembangunan ekonomi di Indonesia dari

sudut pandang satu tokoh tertentu. Selain itu, saat munculnya tawaran sistem ekonomi Islam yang berbasis pemberdayaan (*empowerment*) yang diusung oleh lembaga keuangan, baik dalam skala mikro maupun makro menjadi penting untuk diulas lebih panjang. Oleh karena itu dalam ulasan ini fokus pada konsep pembangunan ekonomi Islam berdasarkan Ibnu Khaldun dan Umer Chapra dalam memandang konsep *empowerment* masyarakat.

Penelitian yang membahas tentang pemikiran Umer Chapra dan Ibnu Khaldun terkait ekonomi syariah telah banyak dilakukan (Aryanti, 2018; M. Umar Chapra, 2008; Hidayatullah, 2017; Huda, 2013; Jirhanuddin, 2016; Tohir, 2014), namun belum terdapat pembahasan terkait konsep empowerment yang ditinjau dari sudut pandang Umer Chapra dan Ibnu Khaldun.

KAJIAN TEORI

Pembangunan Ekonomi Islam

Kajian tentang konsep pertumbuhan (*growth*) dan pembangunan (*development*) ekonomi suatu negara menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dipungkiri guna menciptakan kenyamanan dalam bermasyarakat dengan menjunjung nilai keadilan dan kesejahteraan. Konsep pembangunan ekonomi Islam ini menjadi sangat penting pula untuk melihat sejauh mana peran ekonomi masyarakat di dunia dan lebih-lebih untuk bekal di akhirat. Konsep ini pada dasarnya telah termaktub baik secara eksplisit maupun implisit dalam kitab Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma' ulama masa lalu. Namun kemunculan kembali konsep ini, belakangan ini sangat sulit diterima dikalangan masyarakat disebabkan mereka sudah terlalu nyaman dan terlena oleh konsep

ekonomi konvensional. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi masyarakat Muslim itu sendiri bagaimana mengkiprakan kembali ekonomi Islam di tengah-tengah berkembangnya ekonomi konvensional.

Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah ibadah. Motif ibadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya. Secara spesifik ada tiga motif utama dalam perilaku ekonomi Islam, yaitu *mashlahah* (*public interest*), kebutuhan (*needs*) dan kewajiban (*obligation*) (Khan, 1997). Istilah pembangunan dalam khazanah peradaban Islam dan dalam karya-karya lazimnya dihubungkan dengan konsep imarah al-ard (memakmurkan bumi) yang dipahami dari ayat Al-Qur'an salah satunya surat Hud Ayat 61 (Mth, 2003). Al-Mizan memaparkan bahwa ekonomi pembangunan pada intinya merupakan turunan dari ilmu ekonomi yang bersifat terapan (*applied economics*). Turunan ilmu ekonomi ini lahir setelah terjadinya perang dunia kedua atau dua abad setelah lahirnya ilmu ekonomi pada tahun 1776 Masehi. Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi tidak lain untuk membentuk masyarakat yang adil (*fair*) dan sejahtera (*welfare*). Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi (*property*) dan ukhrawi (*hereafter*) (Al Mizan, 2016).

Ilmu pembangunan ekonomi Islam diperlukan dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Negara-negara yang baru saja merdeka dan bahkan belum mampu untuk berkembang. Pada

umumnya negara-negara ini adalah negara yang sedang berkembang dan menghadapi masalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbelakangan, dan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Di lain sisi negara-negara Islam pada umumnya tidak mampu menginternalisasi mesin pertumbuhan. Paradok yang terjadi di negara Muslim adalah bahwa mereka kaya akan sumber daya alam, namun ekonominya lemah dan miskin (Khursid, 1980), oleh karena itu, pembangunan ekonomi Islam sangat dibutuhkan untuk mengubah cara berfikir tentang konsep pembangunan ekonomi masyarakat secara umum, utamanya di negara Indonesia.

Barometer keberhasilan pertumbuhan ekonomi Islam menurut Beik (2016) tidak semata-mata dapat dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam (Beik, 2016). Sedangkan menurut Khurshid Ahmad, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah: 1) Sumber daya yang dapat dikelola (*invisibile resources*), 2) Sumber daya manusia (*human resources*), 3) Wirausaha (*entrepreneurship*), 4) Teknologi (*technology*). Ekonomi Islam melihat bahwa faktor-faktor di atas sangat penting dan diinginkan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi (Khursid, 1997).

Dalam perkembangannya, para ahli ekonom memberikan pengertian

atau batasan tentang ekonomi pembangunan berdasarkan latar belakang tersebut. Ekonomi pembangunan adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, dengan memecahkan masalah-masalah utamanya, yakni kemiskinan, pengangguran dan pemerataan (Aedy, 2011). Selanjutnya, Khurshid Ahmad menegaskan bahwa konsep pembangunan yang Islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep *tazkiyah*, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari *tazkiyah* adalah *falâh*, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat (Khurshid, 1976).

Lahirnya pembangunan ekonomi Islam bermaksud mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cepat, tepat, dan tuntas berlandaskan kepada kedua sifat dasar tujuan pembangunan ekonomi Islam. Maka analisa ekonomi pembangunan Islam dapatlah didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya Negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat dan tepat sesuai dengan ajaran Islam yang lebih menjunjung etika perekonomian. Ekonomi pembangunan Islam bersifat menyeluruh, tidak diukur menggunakan alat kekayaan atau peningkatan pendapatan, melainkan kekayaan dan pendapatan yang didapatkan tersebut digunakan untuk mengantarkan pemiliknya kepada tingkat kesejahteraan dunia dan akhirat (Martono, 2008). Oleh karena itu, untuk menciptakan pembangunan ekonomi Islam dimulai dengan dua barometer khusus yaitu kesejahteraan masyarakat

yang terjadi di dunia dan akhirat nantinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan data dan analisis kualitatif (Moloeng, 1999). Metode kualitatif merupakan penelitian yang memiliki sasaran penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasannya dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian (Bungin, 2001). Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber-sumber otentik yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber utama dalam penelitian ini yaitu dari beberapa buku, jurnal dan artikel tentang ekonomi pembangunan serta informasi yang diperoleh dari seminar baik dalam skala nasional ataupun Internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembangunan Ekonomi Islam Ibnu Khaldun

Pada abad ke-20, cendekiawan Muslim mulai menampakkan taring semangat keilmuannya yang sempat meredup beberapa tahun yang lalu. Islamisasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan disiarkan dan diaplikasikan diberbagai konverensi dan pembahasan mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan digagas, baik dalam skala mikro ataupun makro, termasuk bidang ekonomi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Kesadaran untuk menyepadukan ilmu-ilmu keIslaman dengan ilmu ekonomi menjadi pemicu bagi para pemikir dan ekonom Muslim untuk memberikan sumbangsuhnya terhadap proses Islamisasi ilmu ekonomi (Suharto, 2012).

Sebelum membahas mengenai teori pembangunan Ibnu Khaldun

terlebih dahulu kita harus mengetahui spirit dari teori pembangunan Ibnu Khaldun yang terdapat dalam konsep *asabiyyah*. *Asabiyyah* merupakan faktor yang dominan penentu dari bangkit dan runtuhnya suatu negara. Kata *asabiyyah* dalam perkembangannya dimaknai sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok (Esposito, 2001). Spirit ini menggambarkan bahwa pembangunan ekonomi dapat terwujud jika semua elemen perilaku ekonomi dapat bersatu merumuskan langkah-langkah strategis mengenai pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini tentunya harus dibangun dari kesadaran masing-masing individu dalam menyikapinya.

Pemikiran Khaldun mengenai jatuh-bangunnya peradaban dapat dikembangkan dalam waktu bersamaan. Maksudnya, bila pada Khaldun awal kebangunan, puncak peradaban, dan runtuhnya peradaban berlangsung dalam waktu berurutan; maka kita bisa mengekstrapolasi menjadi tiga jenis kelembagaan ekonomi (Athoillah & Q-Anees, 2013). Misalnya kita dapat merumuskan: 1) Lembaga ekonomi yang baru membangun dirinya; syaratnya adalah adanya *ashabiyah* ada kerjasama dalam bentuk sederhana, dan penguasa yang dapat menyatukan keberbedaan antar anggota masyarakat itu; basisnya masih pertanian, belum terjadi spesifikasi keahlian (masih homogen). 2) Lembaga ekonomi yang sedang mencapai puncaknya; syaratnya adalah kepemimpinan yang dapat meredakan konflik, berkembangnya spesialisasi, adanya lembaga pendidikan yang menunjang spesialisasi, berkembangnya teknologi, lembaga hukum, dan system yang adil. 3) Lembaga ekonomi yang mengalami penurunan dan kebangkrutan; terjadi ketika *ashabiyah* mulai menurun sehingga terjadi

persaingan antar pelaku usaha. Penurunan *Ashabiyah* ini menurun ketika penguasa mengutamakan kepentingan dirinya.

Pemikiran fonamental Ibnu Khaldun tentang ekonomi pembangunan Islam dapat kita temukan dalam karyanya yakni *Muqaddimah*. Buku ini dinamakan *Muqaddimah* karena merupakan landasan teoritis tentang sejarah (termasuk di dalamnya dasar ilmu-ilmu sosial) yang dia tulis menjadi buku yang jauh lebih besar dan berjilid-jilid, berjudul *Kitâb Al-Ibar*. Kata *Al-Ibar* bisa berasosiasi dengan kata-kata pinjaman dari bahasa Arab, yaitu *ibarat*, atau mengambil *tamsil* (pelajaran yang tersembunyi). Jadi, *Kitâb Al-Ibar* berarti kitab yang mengambil pelajaran-pelajaran dari sejarah bangsa Arab dan bangsa Barbar (Rachman, 2011). Pembahasan mengenai pembangunan termasuk tema yang penting dalam karyanya. Istilah pembangunan dalam karyanya mengacu pada istilah "*umran al-alam*" atau memakmurkan dunia. Istilah "*umran al-alam*" dibentuk dari tiga komponen yaitu; sejarah (*tarikh*), kerjasama masyarakat (*al-ijtima` al-insani*) dan alam semesta (*al-kawn*) (Tohir, 2014).

Pendapat Muhamad Sa`id Ramadan al-Buti (1998) membagi konsep pembangunan ekonomi menurut Ibnu Khaldun menjadi tiga komponen juga, yaitu manusia (*insan*), kehidupan (*al-hayat*) dan alam (*al-kawn*). Ketiga-tiga komponen ini berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam masyarakat yang digerakkan oleh semangat persaudaraan (solidaritas atau *ashabiyah*) sehingga melahirkan negara (*dawlah*) dan kemakmuran (*umran*). Di atas kaidah inilah *umran al-`alam* dapat didefinisikan suatu ilmu baharu lagi "dinamik" serta mengandung makna yang sangat luas, bukan sahaja dari segi sosial atau pembangunan yang bersifat

fizikal dan lokal, tetapi merangkumi aspek rohani dan jasmani yang bersifat "universal" bagi tujuan mencapai kebahagiaan dan kemakmuran manusia" di dunia dan di akhirat (Yahya, 2011).

Dalam memahami masyarakat Ibnu Khaldun menggunakan sejarah sebagai alat untuk memahami dinamika alami suatu masyarakat. Pada mulanya masyarakat adalah kelompok kecil yang kemudian berkembang menjadi masyarakat yang lebih kompleks. Ia membagi masyarakat dalam dua kelompok yaitu, badui (*badawa*) yang hidup secara nomaden, dan yang hidup menetap di suatu tempat (*hadarah*). Teori pembangunan Ibnu Khaldun yang terdapat dalam *Muqaddimah* menjelaskan bagaimana sebuah negara bangkit dan terpuruk. Dasar teori itu dituangkan dalam istilah Ibnu Khaldun "*delapan nasehat utama*" (*kalimat hikamiyyah*) dari kearifan politik, antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang kuat, jika diurutkan maka antara yang awal dan yang akhir tidak dapat dipisahkan (M. Umar Chapra, 2008).

Berikut delapan nasehat Ibnu Khaldun yaitu; 1) Pemerintah yang kuat tidak akan terwujud kecuali melalui pelaksanaan syariah, 2) Syariah tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan (*al-mulk*), 3) Kerajaan tidak akan meningkatkan kekuatannya kecuali melalui masyarakat (*ar-rijal*), 4) Masyarakat tidak akan bertahan kecuali dengan kekayaan (*al-mal*), 5) Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (*al-imarah*), 6) Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (*al-adl*), 7) Keadilan adalah kriteria (*al-mizan*) yang mana digunakan oleh Tuhan untuk menilai manusia, dan 8) Pemerintahan dibebankan tanggung jawab untuk merealisasikan keadilan.

Berdasarkan delapan nasehat Ibnu Khaldun tentang pembangunan ekonomi yang dinukil dari kitab *muqaddimah*. Ibnu Khaldun dapat memberikan elaborasi dari delapan prinsip tersebut agar mudah dipahami. Sehingga pemikiran dia terkenal dengan multidisiplin dan memiliki karakter yang dinamis serta mengandung nilai-nilai religiusitas. Sebab analisis dari Ibnu Khaldun mampu menghubungkan semua variable penting sosio-ekonomi dan politik. Berikut tawaran Ibnu Khaldun terhadap konsep pembangunan ekonomi Islam:

Pertama, Peran Manusia atau *ar-rijal*, manusia memiliki cirri-ciri sendiri yaitu; a) manusia memiliki pengetahuan dan keahlian yang merupakan hasil dari berfikir, b) manusia butuh akan pengaruh yang sanggup mengendalikan, dan kepada kekuasaan yang kokoh, sebab tanpa itu (yang dimaksud adalah organisasi masyarakat atau ijtima insani) eksistensinya nihil, c) manusia bisa melakukan berbagai usaha untuk menciptakan penghidupan, d) manusia menginginkan peradaban yang maju (Ibnu Khaldun, 2000).

Kedua, Peran Pembangunan atau *al-imarah* dan Keadilan atau *al-adl*, Jika manusia menjadi pusat analisis, maka pembangunan dan keadilan menjadi hubungan paling penting dalam rangkaian sebab-akibat bangkit dan runtuhnya suatu negara. Pembangunan ekonomi menjadi sangat penting karena tanpa adanya perbaikan nyata dalam kesejahteraan rakyat, mereka tidak termotivasi untuk melakukan yang terbaik dan lebih bermamfaat. Selain itu, dengan tidak adanya pembangunan, masuknya cendekiawan, seniman, tenaga kerja dan modal yang harus diadakan dari masyarakat lain untuk mendorong pembangunan lebih lanjut menjadi tantangan suatu negara.

Ketiga, peran lembaga dan pemerintah, sebaik apapun sebuah peraturan tidak akan berarti jika tidak dilaksanakan secara adil dan tidak memihak. Syariah pada hakikatnya hanya bisa memberikan sebuah aturan dalam masyarakat, ia tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu diperlukan sebuah otoritas yang bisa menjalankan semua aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, dan pedoman. Menurut Ibnu Khaldun, *al-mulk* memiliki arti kerajaan yang mana seharusnya seorang pengusaha dapat membela dan berpihak pada rakyatnya untuk mewujudkan kesejahteraan negaranya.

Keempat, peran kekayaan atau *al-mal*, Kekayaan dalam kehidupan sangatlah penting, karena kekayaan dapat menyediakan bahan utama yang diperlukan untuk memastikan keadilan dan pembangunan berjalan dengan baik, memacu efektivitas pelaksanaan aturan-aturan oleh pemerintah, serta terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kekayaan tidak tergantung pada satu pos tertentu. Dalam analisisnya Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya pembagian kerja dan spesifikasi untuk membangun ekonomi secara bersama dengan mengedepankan konsen kerjasama.

Konsep Pembangunan Ekonomi Islam Umer Chapra

Pemikiran Umer Chapra tentang pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pada saat itu, khususnya di negara-negara Muslim yang rata-rata masih dalam kategori *negara berkembang* dan masih menggantungkan pada sistem serta bantuan dari Barat dan Amerika yang menganut sekularisme. Pemikiran Chapra, khususnya dalam buku *Islam and Economic Development* merupakan kritik atas kecacatan sistem ekonomi Barat, kesadaran akan pentingnya

menggunakan sistem yang berbasis ajaran Islam, serta tawaran solusi-solusi untuk pembangunan yang lebih baik.

Tabel. 1
Konsep Pembangunan Ekonomi Islam

Nama Tokoh	Konsep Pemikiran Pembangunan	Fungsi
Ibnu Khaldun	Peran manusia atau <i>ar-rijal</i>	Sebagai pemikir yang memiliki pengetahuan (konseptor)
	Peran Pembangunan atau <i>al-imarrah</i> dan Keadilan atau <i>al-adl</i>	Untuk kemaslahatan ummat
	peran lembaga dan pemerintah	sebagai pemangku kebijakan
	peran kekayaan atau <i>al-mal</i>	Sebagai instrumen pembangunan
Umer Chapra	Efisiensi, keadilan dan moral	Mengatur segala kegiatan dalam perekonomian
	Peran negara	Sebagai pemangku kebijakan

Sumber:diolah (2018)

Pembangunan ekonomi yang berkeadilan membutuhkan efisiensi dan pemerataan penggunaan dari semua sumber daya. “Efisiensi” maupun “keadilan” tidak bisa didefinisikan atau diaktualisasikan tanpa suntikan dimensi moral dalam kegiatan ekonomi (M. Umar Chapra, 1993). Dari sekian banyak pemikir sebelumnya, Umer Chapra menyetujuinya, sehingga pemikiran Chapra sebenarnya ini lebih mengarah pada upaya penyegaran pemikiran, respon, dan tawaran solusi atas masalah-masalah ekonomi pada umumnya dan pembangunan khususnya yang dihadapi umat Islam. Pemikiran Umer Chapra mengarah pada dua konsep berikut ini:

Pertama: Efisiensi, keadilan dan moral. Efisiensi dan keadilan didefinisikan dalam beberapa sudut pandang. Dalam sudut pandang syariah, definisi yang paling tepat adalah sesuatu yang dapat mewujudkan visi pembangunan Islam. Maka dari itu, efisiensi yang optimal dapat dicapai

dalam alokasi sumber daya apabila jumlah batas maksimum dari barang dan jasa pemenuh-kebutuhan diproduksi dengan tingkat stabilitas ekonomi yang wajar dan tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pandangan mengenai efisiensi dan keadilan sangatlah penting menjadi landasan dalam pembangunan, karena selama ini asumsi yang dibangun oleh teori selalu tentang kelangkaan dihadapkan dengan maksimalisasi kepuasan. Akibatnya adalah timbulnya keserakahan dan ketimpangan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pembangunan dalam Islam (*umran al-alam*) harus bisa menciptakan efisiensi dan pemerataan sumber daya yang terbatas diantara kebutuhan manusia yang tak terbatas. Begitupun dengan moral seseorang, jika moral masyarakat baik maka proses pembangunan ekonomi akan lebih gampang terarahkan.

Kedua: Peran negara, alasan utama mengapa kehadiran negara pada proses pembangunan ekonomi sangat penting karena suatu hal yang tidak realistis jika semua manusia memiliki kesadaran moral dalam bertindak di masyarakat. Dengan demikian kehadiran negara sangat diperlukan untuk memainkan perannya menjalankan Syariah, melakukan pembangunan dan pemerataan (M Umar Chapra, 2007). Peran-peran pemerintah yang dimaksud diantaranya, 1) membangun kualitas sumber daya manusia (*people centre of development*) 2) mengurangi pemusatan kekayaan. 3) restrukturisasi ekonomi dan keuangan.

Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam

Berdasarkan dari dua pemikiran pembangunan ekonomi Islam di atas, dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi Islam tidak hanya memandang untuk mengukur tingkat kesejahteraan di dunia, jauh lebih penting dari itu yaitu bagaimana kesejahteraan di akhirat nantinya. Konsep yang dibangun oleh dua pemikir tersebut mengarah pada konsep pemberdayaan atau empowerment sumber daya alam secara efisien dan merata dengan menjunjung nilai-nilai etika dan keadilan sosial.

Pemberdayaan masyarakat tergolong pada sebuah strategi pembangunan ekonomi yang sekarang ini sudah banyak diterima di kalangan masyarakat kecil utamanya di negara Indonesia, bahkan telah berkembang dari berbagai konsep dan lembaga yang mewadahnya. Salah satu contoh konsep empowerment ini yaitu banyak dipraktikkan di lembaga keuangan mikro Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin berkembangnya lembaga BMT (*Baitul Mal Wal At-Tamwil*) dari tahun ke tahun. Meskipun dalam kenyataannya

strategi ini masih belum secara maksimal diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Sebab masyarakat masih terlalu percaya terhadap sistem kapitalis yang memang sudah digelutinya. Di samping itu banyak pemikir dan praktisi belum memahami dan meyakini bahwa partisipatif atau pendekatan *empowerment* ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi.

Pada sisi lain, mengapa konsep pembangunan yang selama ini diterapkan belum mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan, sebab dari sekian konsep pembangunan, masyarakat tidak memiliki pesan secara aktif untuk mewujudkannya. Sehingga pembangunan yang digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup di bawah garis standar kemiskinan. Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, seperti tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Berbagai kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk 1). memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan 2). berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Graha, 2009). Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster

dan Oxford English Dictionary dalam Mardi Yatmo Hutomo, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain dan *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan (Hutomo, 2000).

Peran aktif sebagai pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku ke arah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku ini yakni, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka (Anwas, 2014). Dari beberapa pemahaman tentang pemberdayaan tersebut, dapat kita cermati bahwa pemberdayaan yang sering dikenal dengan istilah *empowerment* merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk memberikan power (daya, kekuatan, tenaga, kemampuan dan kekuasaan) kepada individu maupun kelompok dengan tujuan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan mereka baik dari aspek ekonomi, pendidikan, spiritual, ataupun aspek social suatu individu maupun kelompok. Dengan demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu sendiri bisa saja berbeda sesuai dengan bidang pemberdayaan yang dilakukan.

Oleh karena itu, agen atau penggerak pemberdayaan hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan bertindak sebagai orang yang seakan lebih cerdas dari pada masyarakat yang akan diberdayakan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadikan individu atau kelompok berdaya dalam mengatasi permasalahan ekonomi saja, seperti biaya hidup, makanan, tempat tinggal dan lainnya.

Akan tetapi, masyarakat tersebut juga memiliki daya atau kemampuan dari aspek pengetahuan, spiritual, dan juga aspek sosialnya. Sebab, permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak hanya bertitik tumpuh pada masalah ekonomi saja, namun juga ada masalah pengetahuan, masalah spiritual, dan masalah kehidupan sosial mereka baik antar individu maupun kelompok.

Terkait dengan hal demikian, agen pemberdayaan (*agent of empowerment*) mesti mengingat bahwa konsep utama pemberdayaan masyarakat tidak hanya memandang kesejahteraan material saja, namun juga harus memperhatikan kesejahteraan spiritual masyarakat yang akan diberdayakan. Seperti yang dikatakan oleh Moh. Ali Aziz bahwa “Konsep utama dari pemberdayaan adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya dari pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan (Aziz, Suhartini, & Halim, 2005). Oleh karena itu, konsep yang diusung oleh dua tokoh di atas sangat relevan sebagai pijakan untuk menemukan alternatif baru sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari dua pemikiran pembangunan ekonomi Islam diketahui bahwa pembangunan ekonomi Islam tidak hanya mengukur tingkat kesejahteraan di dunia semata, jauh lebih penting dari itu yaitu bagaimana kesejahteraan di akhirat nantinya. Konsep yang dibangun oleh dua pemikir tersebut lebih mengarah pada pemberdayaan atau *empowerment* sumber daya alam secara efisien dan merata dengan menjunjung nilai-nilai

etika dan keadilan sosial. Konsep *empowerment* memberikan tawaran baru terhadap instrumen pembangunan ekonomi perspektif Islam yang mana hal ini diusung oleh dua tokoh fundamental yaitu Ibnu Khaldun dan Umer Chapra.

Pembangunan dalam karyanya Ibnu Khaldun mengacu pada istilah "*umran al-alam*" atau memakmurkan dunia. Istilah "*umran al-alam*" dibentuk dari tiga komponen yaitu; sejarah (*tarikh*), kerjasama masyarakat (*al-ijtima` al- insani*) dan alam semesta (*al-kawn*). Sedangkan Umer Chapra memiliki pandangan lain yang mengusung pembangunan yang berkeadilan dengan memaksimalkan

efisiensi dan pemerataan penggunaan dari semua sumber daya sesuai moral dalam kegiatan ekonomi.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menjabarkan tentang konsep teori ekonomi pembangunan yang hanya terpaku pada Ibnu Khaldun dan Umer Chapra, melainkan tokoh-tokoh ekonomi Islam lainnya, seperti al-Gazali, Ibnu Taimiyah dan juga mengelaborasi konsep tersebut dengan implementasinya dalam perekonomian dengan memberikan bukti empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, H. (2011). *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al Mizan. (2016). Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 01(02).
- Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Aryanti, Y. (2018). Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi dan Politik. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2. <https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1256>
- Athoillah, M. A., & Q-Anees, B. (2013). *Filsafat Ekonomi Islam*. Bandung: Sahifa.
- Aziz, Moh. Ali, Suhartini, R., & Halim, A. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren atas kerjasama dengan Dakwah Press, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Beik, I. S. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Chapra, M. Umar. (1993). *Islam and Economic Development*. Islamabad: Islamic Reseach Institute Press.
- Chapra, M Umar. (2007). *Islam and Economic Development*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank.
- Chapra, M. Umar. (2008). Ibnu Khaldun's Theory of Development: Does It Help Explain the Low Performance Present-Day Muslim World? *The Journal of Socio-Economics*, 37(02).
- Chapra, M Umer. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Riyadh:

- International Islamic Publishing House.
- Esposito, John. L. (2001). *Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan.
- Graha, A. N. (2009). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 05(02).
- Hidayatullah, I. (2017). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1). Diambil dari <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/318>
- Huda, C. (2013). Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam: Ibnu Khaldun. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 04(01).
- Hutomo, M. Y. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas.
- Ibnu Khaldun. (2000). *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Jirhanuddin, J. (2016). Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal Al-Qardh*, 1(2). Diambil dari <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/631>
- Khan, M. A. (1997). *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan Tentang Ekonomi)*. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia.
- Khurshid, A. (1976). *Economic Development in an Islamic Framework, Studies Islamic Economics*. King Abdul Aziz University.
- Khursid, A. (1980). Studies in Islamic Economics. *International Journal of Middle East Studies*, 17(2), 413.
- Khursid, A. (1997). *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*. Jakarta: Risalah Gusti.
- Martono, T. (2008). *Ekonomi Pembangunan*. Surakarta: UNS Press.
- Mohammad, M. T. S. H. (2010). Principles of Sustainable Development in Ibn Khaldun's Economic Thought. *Malaysian Journal of Real Estate*, 05(01).
- Moloeng, L. J. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mth, A. (2003). Konsep Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 10. Diambil dari <https://www.neliti.com/id/publications/42590/konsep-pembangunan-ekonomi-islam>
- Rachman, B. M. (2011). *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi.
- Saputra, B. A. (2016). *Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran M. Umer Chapra*. UIN Sunan Kalijaga.
- Suharto, U. (2012). *Ilmu Ekonomi Islam Sebagai Persepaduan Ilmu Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Agama Islam: Satu Pengamatan Ringkas (Islamic Economics as An Integration between Economics and Islamic Studies: A Brief Observation)*. In Mohd Zaidi Ismail and Wan Suhaimi Wan Abdullah (Eds.) *Adab dan*

- Peradaban*. Malaysia: MPH Publishing.
- Tohir, M. (2014). *Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun dan M. Umer Chapra* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Yahya, M. H. (2011). Umran Al ‘Alam Dari Perspektif Ibn Khaldun: Suatu Anjakan Paradigma. *International Journal of West Asian Studies*, 03(01).